

## Studi Kasus Negara Berkembang (Indonesia dan India)

Dinda Meiliani<sup>1</sup>, Sabila Maharani<sup>2</sup>, Tarisya Indriani<sup>3</sup>, Irfan Fauzi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>STAI "UISU" Pematangsiantar, Indonesia

Email: [dindameiliani263@gmail.com](mailto:dindameiliani263@gmail.com)<sup>1</sup>, [sabilamaharani7878@gmail.com](mailto:sabilamaharani7878@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[indrianitarisya72@gmail.com](mailto:indrianitarisya72@gmail.com)<sup>3</sup>, [irfan17fauzi@gmail.com](mailto:irfan17fauzi@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Sistem pendidikan di Indonesia dan India memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk sumber daya manusia yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Di Indonesia, jenjang pendidikan terdiri atas prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi, dengan penerapan Kurikulum Merdeka yang menekankan karakter dan kompetensi. Sementara di India, pendidikan dibagi dalam sistem 5-3-2 tahun di bawah pengawasan NCERT, dengan fokus pada keterampilan dan kemandirian peserta didik. Kedua negara menghadapi tantangan seperti ketimpangan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta kesenjangan akses pendidikan. Meski demikian, Indonesia dan India terus berupaya memperbaiki mutu pendidikan melalui pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan pemanfaatan teknologi. Kata Kunci: Pendidikan, Indonesia, India, perbandingan, mutu pendidikan

### ABSTRACT

*The education systems of Indonesia and India share the same goal-to develop knowledgeable, well-charactered human resources who are ready to face future challenges. In Indonesia, the education levels consist of preschool, primary, secondary, and higher education, with the implementation of the Independent Curriculum that emphasizes character and competence. Meanwhile, India applies a 5-3-2 education structure under the supervision of NCERT, focusing on students' skills and independence. Both countries face similar challenges, such as unequal facilities, teacher quality, and limited access to education. Nevertheless, Indonesia and India continue to improve the quality of education through curriculum reform, teacher development, and the use of technology.*

*Keywords: Education, Indonesia, India, comparison, education quality.*

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan pengetahuan, dan membentuk karakter yang berakhlak serta berdaya saing. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang dirancang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masing-masing, termasuk Indonesia dan India yang sama-sama tergolong sebagai negara berkembang. Keduanya memiliki tujuan yang

serupa, yakni mencetak sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Sistem pendidikan di Indonesia dan India sama-sama mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi kurikulum, struktur, maupun kebijakan. Indonesia menerapkan jenjang pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi dengan berbagai pembaruan kurikulum seperti Kurikulum Merdeka yang menekankan karakter dan kompetensi. Sementara itu, India menerapkan sistem 5-3-2 tahun di bawah pengawasan *National Council of Educational Research and Training* (NCERT) dengan fokus pada keterampilan dan kemandirian peserta didik.

Meskipun memiliki kemajuan masing-masing, kedua negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada kompleksitas kurikulum, kesenjangan kualitas guru, dan ketimpangan fasilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sedangkan di India, masalah utamanya meliputi kesenjangan kualitas pendidikan, diskriminasi sosial, orientasi ujian dan hafalan, serta persaingan yang ketat untuk memasuki lembaga pendidikan tinggi.

Melalui kajian perbandingan sistem pendidikan antara Indonesia dan India ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran umum mengenai persamaan dan perbedaan sistem pendidikan di kedua negara, termasuk permasalahan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pembahasan ini menjadi penting sebagai bahan refleksi dan inspirasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan resmi yang relevan dengan sistem pendidikan di Indonesia dan India. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder, diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan dokumen yang membahas struktur, kebijakan, serta tantangan pendidikan di kedua negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena pendidikan melalui analisis teori dan temuan empiris yang telah ada, tanpa melakukan observasi atau eksperimen langsung di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap informasi yang ditemukan dalam literatur. Peneliti menyeleksi sumber-sumber yang kredibel, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema seperti struktur pendidikan, kebijakan kurikulum, serta upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dan India. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan kedua sistem pendidikan tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi aktual pendidikan di negara berkembang, khususnya Indonesia dan India, serta menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan kebijakan pendidikan di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Sistem Pendidikan**

#### **1) Sistem Pendidikan di Indonesia**

Sistem pendidikan di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, sosial, dan kebijakan. Sistem ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Tujuan utama dari sistem pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenjang, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta dilengkapi dengan pendidikan non-formal dan informal yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejarah sistem pendidikan di Indonesia mengalami perjalanan panjang dimulai pada masa kolonial Belanda, ketika pendidikan hanya diberikan kepada kalangan elit dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial. Setelah kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai membangun sistem pendidikan nasional yang lebih merata melalui berbagai kebijakan dan penyempurnaan kurikulum. Reformasi pendidikan terus dilakukan dari masa ke masa, seperti Kurikulum 1975, 1984, 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka pada tahun 2022, yang menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, karakter, dan teknologi.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi dalam sistem pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi dan kemampuan berpikir kritis serta pembelajaran yang adaptif terhadap teknologi. Misalnya, Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi di bidang sains dan teknologi, serta Merdeka Belajar yang memberikan fleksibilitas lebih bagi sekolah dan siswa dalam menyusun metode pembelajaran. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kualitas guru, serta keterbatasan fasilitas di daerah terpencil. Di tengah tantangan ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program-program seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan pemerataan akses pendidikan agar setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang. Berikut merupakan sistem pendidikan di Indonesia:

a. Pendidikan Prasekolah

Disebut prasekolah karena anak pada usia antara 3 tahun sampai 5 tahun yang dimaksudkan menjadi peserta pendidikan diarahkan untuk persiapan dan adaptasi bagi pendidikan berikutnya di SD. Metode dan materi pelajarannya berpola *learning by doing*, dengan memperbanyak permainan untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Itu sebabnya disebut dengan Taman Kanak-kanak (TK). Umumnya TK ini terdiri dua tingkat, yaitu: TK Kecil usia 4 tahun dan TK Besar usia 5 tahun.

Umumnya kegiatan belajar di TK sederhana, materi pelajarannya berkisar pada pengenalan warna, benda, huruf dan angka, selebihnya diberikan permainan dan keterampilan untuk kreativitas anak, seperti menggunting, melipat, atau mewarnai. Namun demikian, kurang lebih mulai tahun 1990-an di Indonesia juga mengembangkan kelompok bermain (*Play Group*).

b. Pendidikan Dasar

Sekolah Dasar (SD): SD merupakan jenjang pendidikan pertama yang berlangsung selama enam tahun, yaitu dari kelas 1 hingga kelas 6.

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP adalah jenjang pendidikan menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun, yaitu dari kelas 7 hingga kelas 9.

d. Pendidikan Menengah

Sekolah Menengah Atas (SMA): SMA adalah jenjang pendidikan menengah atas yang berlangsung selama tiga tahun, yaitu dari kelas 10 hingga kelas 12. SMA memiliki beberapa program studi, seperti IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa.

e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SMK adalah jenjang pendidikan menengah yang berfokus pada keterampilan dan keahlian tertentu yang terkait dengan dunia kerja. SMK menawarkan program kejuruan dalam berbagai bidang, seperti teknik, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain.

f. Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari universitas, institut, dan politeknik. Perguruan tinggi menyediakan program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3) dalam berbagai disiplin ilmu.

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 278 juta jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi tantangan sekaligus potensi besar dalam pengembangan sistem pendidikan nasional, karena pemerintah harus memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah.

Sistem pendidikan di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertanggung jawab atas kebijakan, standar, dan pengawasan pendidikan di seluruh tingkatan. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga terlibat dalam mengatur dan memastikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Kemendikbudristek meluncurkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Kurikulum Merdeka menerapkan sistem pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana pendidik diberi keleluasaan memilih perangkat ajar yang sesuai pada materi dan sesuai dengan kebutuhan serta minat peserta didik. Kurikulum bebas memiliki pembelajaran intrakurikuler yang bermacam-macam, sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mempelajari konsep dan menguatkan keterampilan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan dimensi pelajar Pancasila.

Kurikulum ini tentunya memiliki banyak kemajuan sebab pengembangan kurikulum berdasarkan pada kebutuhan dan perkembangan teknologi, Kurikulum Merdeka ini mengintegrasikan pembentukan karakter

yang baik dan mencetak generasi yang cakap literasi. Adapun strategi pembelajaran yang menjadi bagian unggulan dari kurikulum ini adalah dari kurikulum pendidikan yang berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bagi sekolah umum dan untuk madrasah dengan Profil Pelajar *Rahmatan Lil Alamin* (P5RA).

## 2) Sistem Pendidikan Di India

Sejarah sistem pendidikan di India tidak terlepas dari pengaruh kolonial Inggris yang mendominasi wilayah tersebut selama hampir dua abad. Pada masa kolonial, pendidikan berfokus pada pembentukan tenaga administratif yang dapat membantu kepentingan pemerintah Inggris. Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, India mulai membangun sistem pendidikan nasionalnya sendiri dengan menekankan pemerataan akses pendidikan, pengembangan karakter, dan kemajuan teknologi. Reformasi besar dilakukan dengan pembentukan NCERT pada tahun 1961 serta pembaruan kurikulum melalui *National Policy on Education* (1968, 1986, dan revisi 1992) hingga munculnya *National Curriculum Framework 2005*.

Dalam sistem pemerintahan India, masalah pendidikan dikelola oleh badan tersendiri yang disebut dengan *National Council of Educational Research and Training* (NCERT). NCERT ini yaitu lembaga pemerintah yang menangani dunia pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Resource Development Ministry*. Kurikulum pendidikan diatur dalam suatu kurikulum nasional yang diberi nama *National Curriculum Framework 2005* yang diterbitkan oleh NCERT. Pemerintah India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 5-3-2 tahun usia sekolah. Tingkat awal, 10 tahun sebagai pendidikan dasar dan terbagi dalam tiga jenjang yaitu *Primary School* (5 tahun), *Upper Primary School* (3 tahun), dan *Secondary School* (2 tahun). Jenjang berikutnya ditempuh selama 2 tahun sebagai persiapan memasuki pendidikan tinggi. Untuk pendidikan kejuruan, jurusan teknik dan bisnis sudah mulai sejak *secondary school*. Struktur pendidikan sekolah dengan sistem 5-3-2 tahun ini telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India (*Union Territory, UT*). Bila dijabarkan dalam tingkat usia sekolah akan tampak sebagai berikut :

Tingkat dasar (*primary stage*) yang meliputi kelas I sampai V yakni 5 tahun masa belajar. Ini dilaksanakan di 20 negara bagian dan teritoria India Pendidikan tingkat menengah (*middle stage*) meliputi kelas VI sampai VIII diselenggarakan di 18 negara bagian dan teritoria India. Pendidikan menengah atas (*secondary stage*) meliputi kelas IX sampai X. Pada tahun 1960 minat siswa pada pendidikan kejuruan sangat kecil. Hingga tahun 1992 siswa yang mengikuti pendidikan dalam bidang ini hanya 6%. Akan tetapi pada tahun 1995 terjadi lonjakan signifikan, yaitu sebesar 25% dari keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil pendidikan kejuruan ini. Sementara itu, pendidikan nonformal dilaksanakan dengan dibentuknya lembaga pendidikan yang bersifat terbuka bagi semua siswa, tidak terikat dengan proses pembelajaran secara langsung dan beban biaya yang tinggi.

Pendidikan tinggi di India tersedia dalam berbagai bidang seperti teknik, kedokteran, hukum, manajemen, seni, sains, dan humaniora. India memiliki beberapa universitas terkemuka seperti Universitas Delhi, Universitas Mumbai, Universitas Calcutta, Universitas Bangalore, dan banyak lagi. India juga

memiliki beberapa lembaga pendidikan teknologi terkemuka seperti Institut Teknologi India, yang terkenal di seluruh dunia. Meskipun sistem pendidikan India memiliki beberapa keunggulan, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di beberapa daerah, dan masalah kualitas pendidikan di beberapa lembaga pendidikan.

Berdasarkan estimasi tahun 2025, jumlah penduduk India mencapai lebih dari 1,43 miliar jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang sangat besar ini menjadi potensi besar sekaligus tantangan bagi pemerintah India dalam memastikan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah negara tersebut.

Struktur dan kurikulum pendidikan di India secara esensial dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris karena latar belakang penjajahan. Namun setelah merdeka, upaya pendidikan ditekankan pada ekspansi yang cepat dibandingkan dengan reformasi menyeluruh. Maka konstitusi yang berlaku pada tahun 1950 selanjutnya menegaskan prinsip bahwa pendidikan merupakan penyampaian materi, karena itu berada dibawah kebijakan pemerintah sedangkan tugas menteri pendidikannya adalah membantu pemerintah melalui penyediaan bimbingan dan dana.

Kurikulum dan standar sekolah dasar mencakup pelajaran membaca, menulis dan mengeja bahasa daerah, sejarah dan kebudayaan India, geografi, sastra, sains dan kesehatan. Di sekolah menengah juga menerima pelajaran sains dan matematika bahkan juga beberapa sekolah mengganti kajian ilmu-ilmu sosial dengan sejarah dan geografi serta sedikit sekolah menengah atas yang memiliki banyak tujuan menawarkan jenis pelatihan manual dan ilmu rumah tangga (*home sciences*). Bahasa Hindi diajarkan (meskipun tidak selalu diberikan kecuali India bagian selatan) di seluruh sekolah menengah atas. Bahasa Inggris justru diberikan bahkan kadang kala diperlukan bagi sekolah menengah atas.

Berdasarkan uraian mengenai gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia dan India, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki struktur dan tujuan pendidikan yang serupa, yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Namun, keduanya memiliki kekhasan dan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan sistem pendidikannya.

Di Indonesia, jenjang pendidikan terdiri dari prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi, dengan kurikulum yang terus diperbarui seperti Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik. Sedangkan di India, sistem pendidikannya mencakup jenjang dasar, menengah, dan tinggi di bawah pengawasan NCERT, dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan kemandirian. Kedua negara sama-sama berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses belajar, meskipun masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan fasilitas dan kualitas tenaga pendidik.

## **B. Permasalahan Utama Sistem Pendidikan**

### **1) Permasalahan di Indonesia**

Kualitas adalah tingkat buruk atau baiknya sesuatu. Dalam hal pendidikan, makna kualitas mengacu pada proses terlaksananya pendidikan

dan hasil pendidikannya. Kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia saat ini terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah yakni ke-74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah.

Dengan melihat realita saat ini, Indonesia perlu terus mengupayakan yang terbaik demi mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yakni pendidikan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, mandiri serta dapat menjadi warga negara yang demokratis.

Berbagai macam permasalahan pendidikan di Indonesia menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. permasalahan tersebut menjadi faktor terbesar rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, kualitas manusia yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pendidikan itu sendiri. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kurikulum yang Membingungkan dan Terlalu Kompleks

Kurikulum merupakan sebuah rancangan atau program yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan untuk peserta didiknya. Di Indonesia, terhitung sudah mengalami 10 hingga 11 kali perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka. Tentu perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan, terutama bagi pendidik, peserta didik, dan bahkan orang tua. Mengubah kurikulum dapat juga diartikan dengan turut mengubah manusia, yaitu pendidik, penyelenggara pendidikan, dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Itu sebabnya perubahan kurikulum tersebut sering dianggap sebagai perubahan sosial atau *social change*.

Kurikulum di Indonesia cenderung membebani siswa dengan terlalu banyak materi yang harus dibaca, yang sebagian besar berupa penjelasan teoritis tanpa diimbangi dengan praktik yang memadai. Akibatnya, siswa sering kesulitan memahami apa yang mereka pelajari karena kurangnya pengalaman langsung.

Pergantian kurikulum memengaruhi kemampuan guru sebagai pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum baru secara menyeluruh. Agar dapat menerapkannya dengan optimal sesuai harapan, guru perlu memahami secara mendalam kurikulum baru beserta semua komponennya. Di beberapa wilayah, keterbatasan fasilitas sekolah sering menjadi hambatan dalam keberhasilan penerapan kurikulum baru. Fasilitas yang tersedia di setiap sekolah di Indonesia masih belum merata. Sekolah di perkotaan umumnya lebih mampu memenuhi kebutuhan yang diharuskan oleh perubahan kurikulum. Namun, kondisi berbeda dialami oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.

b. Masalah Penempatan dan Kesejahteraan Guru

Pada beberapa kasus pendidikan di Indonesia, masalah penempatan guru ini masih kerap terjadi. Terutama penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatannya atau keahliannya. Hal ini dapat

menyebabkan guru tidak bisa optimal dalam mengajar. Ketidaklayakan mengajar guru dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu ketidaksesuaian antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru tersebut.

Kurangnya apresiasi terhadap para pendidik di Indonesia tercermin dari rendahnya gaji rata-rata guru dan dosen dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menurut data, gaji guru di Indonesia berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan untuk guru ASN, dan Rp1 juta hingga Rp3 juta per bulan untuk guru honorer, tergantung pada daerah dan sumber dana. Sebagai perbandingan, di Malaysia, gaji guru pemula berkisar antara MYR 2.500 hingga MYR 4.000 per bulan (sekitar Rp8,2 juta hingga Rp13 juta), dengan tambahan tunjangan khusus bagi guru yang mengajar di daerah pedalaman.

c. Kesiapan Sekolah di Wilayah Perkotaan dengan Pedesaan

Sekolah-sekolah di wilayah terpencil kerap menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas, termasuk akses terhadap teknologi, ketersediaan bahan ajar yang memadai, dan konektivitas internet. Kondisi ini menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran di daerah pedesaan. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya pendidikan, cenderung menghadapi lebih sedikit hambatan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Guru-guru di sekolah ini biasanya memiliki akses yang lebih memadai terhadap pelatihan dan sumber belajar, sehingga mereka dapat lebih kreatif dalam merancang rencana pembelajaran. Di sisi lain, sekolah-sekolah di daerah pedesaan atau pinggiran kota dengan keterbatasan sumber daya menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Guru-guru di wilayah tersebut sering kali belum mendapatkan pelatihan yang memadai dan mengalami kesulitan dalam mengakses bahan ajar yang dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum secara efektif.

d. Kesiapan Tenaga Pendidik

Banyak guru memerlukan pelatihan tambahan untuk mendalami konsep, metode, dan pendekatan pembelajaran yang diharapkan oleh kurikulum baru. Kurangnya pelatihan ini sering kali mengakibatkan implementasi kurikulum di kelas menjadi kurang optimal. Terutama pendidik yang bertugas di daerah pedesaan atau di daerah 3T, kebanyakan pendidik disana masih menggunakan metode pembelajaran yang masih tradisional yang cenderung monoton, dan hal tersebut disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia serta kesiapan tenaga pendidik mengenai IPTEK. Tidak semua guru mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Sebagian guru masih belum terbiasa menggunakan perangkat elektronik, seperti LCD, untuk mendukung kegiatan mengajar. Bahkan, adayang kurang memahami cara memanfaatkan internet untuk mencari materi dan media pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran cenderung monoton, terbatas pada penggunaan buku teks, dan jarang melibatkan teknologi.

e. Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses terhadap teknologi dan mereka yang tidak, semakin memperburuk ketidakadilan dalam pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali tidak memiliki akses ke perangkat teknologi dan internet, sehingga menghalangi mereka

untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan teman-teman sebaya mereka.

Kesenjangan digital tetap menjadi isu mendesak di Indonesia, menghalangi optimalisasi manfaat teknologi dalam pendidikan. Sementara wilayah perkotaan dan institusi pendidikan yang sudah mapan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap teknologi, masyarakat pedesaan dan kelompok kurang mampu sering kali kekurangan infrastruktur serta sumber daya yang memadai. Keterbatasan akses ke internet berkecepatan tinggi, minimnya perangkat komputer dan digital, serta kurangnya pelatihan bagi guru menjadi hambatan utama dalam penerapan teknologi di daerah-daerah tersebut.

## 2) Permasalahan di India

India merupakan negara terluas ketujuh di dunia dengan luas wilayah 3.287.263 km persegi. Mayoritas penduduknya beragama Hindu (83%) dan Islam (12%), serta agama lain seperti Kristen dan Sikh. Ekonomi India didominasi oleh sektor peternakan dan pertanian, yang memberikan kontribusi 34% dan 69% terhadap pendapatan negara. Industri perfilman seperti Bollywood menjadi sumber pekerjaan dan pelestarian budaya.

Pendidikan di India masih menghadapi tantangan seperti kualitas pendidikan yang tidak merata, kurangnya infrastruktur, dan keterlibatan guru yang belum efektif. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan peningkatan anggaran pendidikan, pengembangan kurikulum relevan, pelatihan guru, dan peningkatan akses ke teknologi pendidikan. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem pendidikan di India adalah sebagai berikut:

### a. Kualitas Pendidikan yang Tidak Merata

Kesenjangan Kualitas dan Akses Pendidikan India menghadapi kesenjangan besar dalam kualitas dan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Anak-anak di daerah pedesaan sering mengalami keterbatasan fasilitas, guru yang kurang terlatih, dan hambatan sosial-ekonomi. Studi menunjukkan lebih dari 40% anak-anak di India putus sekolah sebelum menyelesaikan kelas delapan, dengan diskriminasi berbasis kasta, agama, dan gender yang masih terjadi di lingkungan sekolah. Anak perempuan dan kelompok dalit sering mendapatkan perlakuan tidak adil seperti dipisahkan secara fisik oleh guru selama pembelajaran.

### b. Orientasi Sistem Pendidikan pada Ujian dan Hafalan

Sistem pendidikan India sangat berfokus pada ujian dan hafalan materi, yang menimbulkan tekanan besar bagi siswa sejak usia dini dan kurang menekankan kreativitas, pemikiran kritis, serta pengembangan keterampilan praktis. Ini membatasi kemampuan siswa dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang dinamis.

### c. Ketatnya Persaingan Pendidikan

Ketatnya Persaingan Pendidikan Tinggi Masuk ke universitas bergengsi di India sangat kompetitif, terutama untuk program STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*). Hanya sebagian kecil pelamar yang berhasil masuk ke Institut Teknologi Terbaik (IIT). Meski demikian, India menghasilkan lulusan STEM dalam jumlah besar di dunia, dengan peningkatan fokus pada AI, pembelajaran mesin, dan ilmu data sejak pendidikan dini.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan utama sistem pendidikan di Indonesia dan India, dapat disimpulkan bahwa kedua negara tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Di Indonesia, masalah utama pendidikan meliputi seringnya perubahan kurikulum, ketimpangan penempatan dan kesejahteraan guru, kesenjangan antara sekolah kota dan desa, serta keterbatasan penguasaan teknologi dan akses digital. Hal ini berdampak pada rendahnya mutu pendidikan nasional. Sementara itu, India menghadapi ketimpangan kualitas antara wilayah, diskriminasi sosial di sekolah, sistem belajar yang berorientasi ujian, dan persaingan ketat masuk perguruan tinggi. Kedua negara perlu terus melakukan reformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas, pembaruan kurikulum, dan pemanfaatan teknologi agar pendidikan menjadi lebih inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

### **3) Persamaan Sistem Pendidikan di Indonesia dan India**

- a. Kedua negara memiliki jenjang pendidikan dasar dan menengah yang wajib diikuti oleh anak-anak, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial. Pendidikan di Indonesia berlandaskan pada nilai Pancasila dan agama, sedangkan di India juga mengintegrasikan nilai agama secara bijaksana dalam kurikulum tanpa membuatnya sebagai mata pelajaran terpisah.
- b. Keduanya menghadapi tantangan serupa seperti kualitas guru, infrastruktur pendidikan, dan kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal.
- c. Dalam konteks kebijakan, kedua negara sama-sama mengatur kurikulum untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan perkembangan anak dan mendorong pendidikan yang terbuka untuk semua anak serta mengembangkan anak secara menyeluruh.

### **4) Perbedaan Sistem Pendidikan di Indonesia dan India**

- a. Struktur jenjang pendidikan berbeda, Indonesia menggunakan sistem 6+3+3 (6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA/SMK) sementara India mengubah sistemnya menjadi 5+3+3+4 (5 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, 3 tahun menengah atas, 4 tahun pendidikan tinggi) yang lebih terperinci.
- b. Fokus pembelajaran di India lebih menekankan pada pendidikan menyeluruh, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan pengalaman pembelajaran yang luas, sedangkan di Indonesia lebih banyak mengandalkan pembelajaran akademik dengan kecenderungan pada hafalan.
- c. *Indian National Education Policy* (NEP) di India telah mengintegrasikan pendidikan vokasional ke dalam arus utama pendidikan, sedangkan Indonesia masih dalam tahap pengembangan integrasi tersebut.
- d. Alokasi anggaran pendidikan juga berbeda, Indonesia mengalokasikan sekitar 20% dari anggaran negara untuk pendidikan, sementara India hanya sekitar 11% sehingga memengaruhi kualitas dan fasilitas pendidikan.

## **C. Upaya dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan**

### **1) Upaya Pemerintah Indonesia**

Pendidikan merupakan suatu upaya terencana dan terstruktur yang dilaksanakan untuk dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Kemampuan yang dimiliki peserta didik tentu beranekaragam, dan itulah merupakan tugas dari seorang guru untuk dapat mengamati dan mempertajam kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga peserta didik mampu menjadi insan kamil. Tugas dalam bidang pendidikan yaitu menghasilkan generasi atau penerus yang bermoral dan beretika. Sesuai dengan harapan dari pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu dengan bisa menghasilkan generasi yang bermoral dan beretika, hal tersebut sesuai dengan impian masyarakat terhadap pendidikan yang ada di Indonesia tahun 2045 di antaranya yaitu aspek pendidikan karakter dan nilai-nilai multikultural. Selain itu, pendidikan juga bisa mengarahkan pada pemahaman kepribadian serta dapat mempertimbangkan aspek globalisasi.

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan tentang penjaminan mutu pendidikan. Upaya penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah kemudian diimplementasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan".

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataannya pada setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki perannya masing-masing.

Dukungan pemerintah pusat kaitannya dengan standarisasi, dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota kaitannya dengan pelayanan anggaran dan fasilitas sekolah. Selain penyediaan sarana dan sumber daya manusia, peranan lainnya dari pemerintah yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bebas dari kepentingan, intervensi serta hal-hal lainnya yang dapat mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu. Untuk itu maka diperlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Upaya dan Strategi Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

a. Penguatan Kebijakan Nasional Melalui Program Merdeka Belajar

Kebijakan Kurikulum Merdeka merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui fleksibilitas dan adaptasi pembelajaran sesuai kondisi kontekstual. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022, dijelaskan bahwa satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk

mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip diversifikasi yang menyesuaikan potensi daerah, karakteristik peserta didik, dan konteks lokal sekolah<sup>1</sup>. Melalui pendekatan ini, sekolah tidak lagi harus kaku pada satu format kurikulum yang sama di seluruh Indonesia, melainkan dapat memilih antara Kurikulum 2013 penuh, Kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau Kurikulum Merdeka secara utuh, sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing<sup>1</sup>.

b. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Guru

Peningkatan profesionalisme guru menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah memperkuat mutu pendidikan, terutama dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Selain kurikulum yang dirancang ulang, perlu ada penguatan kapasitas pendidik dan kepala sekolah agar mampu menjalankan pembelajaran yang berbasis diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, serta adaptif terhadap kebutuhan siswa. Ini termasuk pelatihan dan pendampingan teknis, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, agar kualitas pengajaran bisa lebih merata.

Selain itu, kajian akademik juga menegaskan bahwa penataan sistem evaluasi guru dan kepemimpinan sekolah perlu diselaraskan agar responsif terhadap variasi kemampuan siswa, karakteristik wilayah, dan konteks lokal. Pemerintah mendorong penerapan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa sejak dini, sehingga guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dan modul ajar. Hal ini juga melibatkan revisi beban kerja administratif guru yang selama ini dianggap membebani, agar pendidik bisa lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif.

c. Pemerataan Akses dan Kesetaraan Pendidikan

Pemerataan akses dan kesetaraan pendidikan menjadi fondasi penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa meskipun akses pendidikan dasar (SD / SMP) hampir universal, masih banyak hambatan di jenjang menengah dan pendidikan nonformal, terutama di daerah terpencil, pulau terluar, dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Untuk mengatasi hal itu, pemerintah meluncurkan berbagai program afirmatif sebagai strategi pemerataan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOP), serta Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk siswa dari daerah 3T dan Papua. Program ini bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan dan mempertahankan anak di sekolah.

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan strategi penting pemerintah untuk mendukung kualitas pembelajaran yang efektif dan merata. Sarana dan prasarana mencakup ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, serta sarana TIK yang memadai. Ketersediaan sarana yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mempermudah guru dalam menyampaikan materi, dan mendukung penerapan metode pembelajaran inovatif. Pemerintah melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BOS Fisik telah membiayai pembangunan serta rehabilitasi sekolah di wilayah 3T dan daerah tertinggal, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih adil untuk belajar dalam lingkungan yang layak.

## 2) Upaya Pemerintah India

India tampak lebih progresif dengan adanya revisi kurikulum yang mengutamakan pengembangan berpikir kritis, kreatif dan analitis. Kebijakan ini juga mendorong pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman, berbeda dengan pendekatan di Indonesia yang masih relatif terpusat pada guru. Pemerintah India telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting terkait pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan diperkenalkannya Kebijakan Pendidikan Nasional (*National Education Policy/NEP*) 2020. Kebijakan ini merupakan perubahan besar pertama sejak 1986 dan bertujuan untuk mengubah sistem pendidikan India agar lebih relevan, dengan kebutuhan abad ke-21.

NEP 2020 di India menempatkan literasi dan numerasi dasar sebagai salah satu prioritas utama, dengan target bahwa setiap anak harus memiliki keterampilan literasi dan numerasi dasar pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan kesadaran pemerintah India akan pentingnya kemampuan dasar sebagai fondasi untuk pembelajaran di tahap-tahap selanjutnya. Peningkatan kualitas pendidikan dasar menjadi salah satu pilar kebijakan ini, dengan harapan bahwa semua anak akan memiliki akses ke pendidikan berkualitas sejak dini.

Berikut adalah beberapa upaya dan strategi utama pemerintah India dalam meningkatkan mutu pendidikan:

a. Kebijakan Pendidikan Nasional (*National Education Policy/NEP*) 2020

Kebijakan Pendidikan Nasional (*National Education Policy/NEP*) 2020 merupakan tonggak penting dalam transformasi sistem pendidikan India. Diperkenalkan pada 29 Juli 2020, NEP menggantikan kebijakan sebelumnya yang telah berlaku selama 34 tahun. Dengan visi menjadikan India sebagai masyarakat pengetahuan global, NEP bertujuan untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang inklusif, fleksibel, dan holistik bagi semua warga negara.

NEP 2020 berlandaskan pada lima pilar utama: akses, kesetaraan, kualitas, keterjangkauan, dan akuntabilitas. Pilar-pilar ini menjadi dasar dalam merancang berbagai reformasi di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Salah satu perubahan signifikan adalah penggantian struktur pendidikan 10+2 menjadi model 5+3+3+4, yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Model baru ini mencakup:

- Tahap Dasar (5 tahun): Usia 3–6 tahun (termasuk pendidikan prasekolah)
- Tahap Persiapan (3 tahun): Kelas 1–2
- Tahap Menengah (3 tahun): Kelas 3–5
- Tahap Sekunder (4 tahun): Kelas 6–12

Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat literasi dan numerasi dasar, serta memastikan pengalaman belajar yang menyeluruh sejak dini. Selain itu, NEP 2020 menekankan pentingnya pembelajaran berbasis keterampilan, pengembangan kreativitas, dan pemikiran kritis. Kurikulum dirancang untuk menghilangkan pemisahan yang kaku antara mata pelajaran, memungkinkan siswa untuk memilih kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pendidikan juga difokuskan pada pengembangan sosial-emosional dan kepemimpinan, serta integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.

b. *Samagra Shiksha Abhiyan*

*Samagra Shiksha Abhiyan* (SSA) menekankan pada pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk kelompok marjinal, anak-anak penyandang

disabilitas, dan mereka yang berada di daerah terpencil. Program ini juga mendorong pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan dan workshop, serta penerapan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Selain itu, SSA mempromosikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah untuk memastikan proses pendidikan yang lebih efektif dan transparan. Dengan demikian, *Samagra Shiksha Abhiyan* menjadi salah satu strategi kunci pemerintah India dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

c. *NIPUN Bharat Mission*

*NIPUN Bharat Mission (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy)*. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak mencapai standar literasi dan numerasi yang sesuai dengan usianya. Pendekatan *NIPUN Bharat Mission* mencakup penilaian berkelanjutan, pelatihan guru, pengembangan materi ajar yang interaktif, serta keterlibatan orang tua dan komunitas. Program ini juga mendorong penggunaan teknologi untuk membantu proses pembelajaran dan evaluasi, sehingga guru dapat mengidentifikasi kebutuhan masing-masing siswa dan memberikan intervensi yang tepat.

Implementasi *NIPUN Bharat Mission* diharapkan dapat mengurangi kesenjangan prestasi belajar di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil atau dengan akses pendidikan terbatas, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk berhasil dalam pendidikan dasar.

e. Integrasi Teknologi dalam Kurikulum

Salah satu langkah penting adalah AICTE (*All India Council for Technical Education*) yang mengarahkan perguruan tinggi untuk memasukkan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi terbaru ke dalam kurikulum. Pendekatan ini mencakup pengembangan keterampilan praktis, pemrograman, analisis data, dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Integrasi teknologi juga mendorong penggunaan *platform* pembelajaran digital, laboratorium virtual, dan *e-resources* untuk mendukung pembelajaran interaktif dan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing siswa.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap lulusan mampu memiliki keterampilan abad 21, termasuk berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Langkah ini juga memperkuat konektivitas antara pendidikan formal dengan kebutuhan industri, sehingga meningkatkan relevansi pendidikan dan daya saing lulusan di pasar global.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dan India memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Keduanya juga terus berupaya melakukan perbaikan melalui pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan pemerataan akses pendidikan. Namun, baik Indonesia maupun India masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan fasilitas, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Meskipun menghadapi kendala, kedua negara menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Indonesia menekankan fleksibilitas melalui penerapan Kurikulum Merdeka, sedangkan India berfokus pada pembelajaran holistik melalui Kebijakan Pendidikan Nasional/ *National Education Policy* (NEP) 2020. Dari

perbandingan tersebut dapat dipetik pelajaran bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum semata, tetapi juga pada pemerataan akses, kualitas guru, dan dukungan teknologi. Dengan terus melakukan reformasi yang berkelanjutan, diharapkan Indonesia dan India dapat mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan Negara-Negara Islam dan Barat*, Gema Media, Yogyakarta, 2003.
- Ali Sobri dan Komarudin Sassi, *Potret Sistem Pendidikan India Era Kontemporer: Tetap Solid Pada Kebijakan Ghandi*, Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS), Vol. 2, No. 1, 2024.
- Amiruddin Siahaan, Et.al, *Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia*, Journal on Education, Vol. 05, No. 03, 2023.
- Andika Yusuf, Et.al, *Tindakan Sistem Pendidikan Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusinya*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 7, No. 3, Maret 2024.
- Anggraini, *Reformasi Pendidikan Menghadapi Tantangan Abad 21*, Journal On Education, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Devi Rosvianto, Mislaini, dan Nila Komala Bintang, *Transformasi Sistem Pendidikan di India: Profil, Tujuan, Manajemen, Pendidikan Islam dan Tantangan dalam Menghadapi Isu Global*, Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Doni Junni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Fitriani, Annur dan Afriantoni, *Revolusi Industri 4.0: Inovasi dan Tantangan Dalam Pendidikan di Indonesia*. Journal Of Education And Culture, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Irsyadul, Et.al, *Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Dasar Studi Kasus Di Sekolah Dasar Di Jawa Timur*, Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Jakaria, *Analisis Kelayakan Dan Kesesuaian Antara Latar Belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dengan Mata Pelajaran Yang Diampu*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, No. 4, 2014.
- Kementerian Pendidikan India, *National Education Policy*, Ministry Of Education, New Delhi, 2020.
- Malihah, *Pendidikan Karakter dan Multikulturalisme di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Mawati dan Arifudin, *Dampak Pergantian Kurikulum Pendidikan Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar*, Jurnal Primary Edu (JEP), Vol. 1. No. 1, 2023.
- Mutia, Wosal dan Monogir, *Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan Di bidang IPTEK*, Jurnal BASICEDU, Vol. 7, No. 6, 2023.
- Mutiara Rajagukguk, Et.al, *Analisis Sistem: Perbandingan Sistem Pendidikan Di Indonesia Dan Malaysia*, Dharmas Education Journal, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Nugroho dan Narawaty, *Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (2020-2021), Dan Kurikulum Prototipe Atau Kurikulum Merdeka (2022) Mata Pelajaran Bahasa Inggris: Suatu Kajian Bandingan*, Sinastra: Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Seni, dan Sastra, Vol. 1, 2022.
- Sari, *Kurikulum Di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Kurikulum Pendidikan*. Inculco Journal Of Christian Education, Vol. 2, No. 2, 2022.

- Subroto, Wirawan, dan Rukmana, *Implementasi Teknologi Dalam Pembelajaran Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan West Science, Vol. 1, No. 7, 2023.
- Supriyadi, *Administrasi Pendidikan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2022.
- Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Syarifuddin Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Thifa Ramadhani, Mislaini, dan Liola Sinta, *Analisis Pendidikan di India dan Perbandingannya dengan Pendidikan Indonesia*, Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Tuti Nuriah Erwin, Et.al, *Sistem Pendidikan dan Pendidikan Sejarah*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 4, No. 1, Januari 2015.
- Zulhuda, Et.al, *Telaah Kurikulum Pendidikan Di Indonesia: Evaluasi, Implementasi, Dan Tantangan Di Era Modern*, Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic), Vol. 3, No. 3, 2024.